

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arief, B. N. (2008). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
- Arief, B. N. (2010). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Arief, B. N. (2014). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Ali, M. (2019). Asas-asas hukum pidana. Sinar Grafika.
- Bentham, J. (1907). An introduction to the principles of morals and legislation. Clarendon Press. (Original work published 1789)
- Hart, H. L. A. (1968). Punishment and responsibility: Essays in the philosophy of law. Clarendon Press.
- Lamintang, P. A. F. (2013). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (1995). Kebijakan hukum pidana. PT Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
- Rawls, J. (1999). A theory of justice (Revised ed.). Harvard University Press.
- Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni. (p. 45)
- Tonry, M. (Ed.). (2011). The Oxford handbook of crime and criminal justice. Oxford University Press.
- Von Hirsch, A. (1993). Censure and sanctions. Clarendon Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 5; Pasal 10A ayat 1; Pasal 10A ayat 3). Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor, Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (butir 1–3; nomor 9). (SEMA No. 4/2011)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2021). Panduan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana. LPSK RI. (dokumen organisasi / pedoman)

C. Karya Ilmiah

Andra, J. (2020). Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang.

Ateng, K. V. L. K., & Adhari, A. (2025). Kriteria disparitas pemidanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. *JIHHP*, 5(3).

Bedau, H. (2004). Bentham's theory of punishment: Origin and content. *Journal of Bentham Studies*, 7(1).

Darmaputra, M. J. (2023). Disparitas Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Putusan PN Semarang.

Gulö, N., & Muharram, A. K. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215–227.

Jaya, M. I., Karim, M. S., & Muchtar, S. (2024). Disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. *Al-Mizan*, 20(1), 1–24.

Kurniawati, A. (2019). Disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi: Studi kasus putusan Tipikor. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Muksin, M. R. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Sapientia et Virtus*, 8(1), 225–247.

McHugh, J. T. (2008). Utilitarianism, punishment and ideal proportionality in penal law: Punishment as an intrinsic evil. *Journal of Bentham Studies*, 10(1).

Nurasiah, M., Harefa, B., & Waruwu, R. (2022). Disparitas Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan hukum atau metode pengujian produk hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2).

Pratama, A. D. (2019). Konsep keadilan John Rawls. *Jurnal Thengkyang*, 4(1).

Rays, M. I., Sucipto, D., & Fality, F. (2023). Kajian yuridis perbandingan pemidanaan bagi orang dewasa dan pemidanaan bagi anak. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 61.

Rumagit, H. (2023). Perkembangan teori pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia: Perspektif sosiologis. *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1).

Sinambela, M., Ablisar, M., Marlina, & Ikhsan, E. (2023). Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika.

Sunaryo, S. (2022). Konsep fairness John Rawls, kritik dan relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1).

Tonry, M. (Ed.). (2011). *The Oxford handbook of crime and criminal justice*. Oxford University Press.

Yahya, K. S., Soesilo, & Suhariyono. (2025). Analisis terhadap disparitas putusan tindak pidana pembunuhan berencana: Studi kasus Nomor 76/Pid.B/2024 dan Nomor 1061/Pid/2024/PT. *JPNM: Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin*, 3(2).

Zaini, Z. (2019). Tinjauan konseptual tentang pidana dan pemidanaan. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2).

Juita, S. R., Sihotang, A. P., & Supriyadi, S. (2020). Penerapan prinsip individualisasi pidana dalam perkara tindak pidana perpajakan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 271–285. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938>

Hajairin, Ilham, Ma'arij, A., & Sanusi, G. (2024). Pedoman pemidanaan hakim

perspektif kebebasan hakim dalam peradilan pidana terintegrasi. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), Januari–Juni. <https://doi.org/10.34304>

D. Sumber Lainnya

HukumOnline. (2022, Oktober). *Jaksa beberkan peran Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir J.* HukumOnline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-beberkan-peran-ferdy-sambo-dalam-pembunuhan-brigadir-j-lt634d0cd0783be/>

HukumOnline. (2022, 18 Oktober). *Peran Richard Eliezer dalam pembunuhan Brigadir J.* HukumOnline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-richard-eliezer-dalam-pembunuhan-brigadir-j-lt634e543446022/?page=2>

HukumOnline. (2022, 20 Oktober). *Eksepsi Ricky Rizal: Minta hakim batalkan dakwaan JPU.* HukumOnline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/eksepsi-ricky-rizal--minta-hakim-batalkan-dakwaan-jpu-lt6351273394d77/>

HukumOnline. (2023, 13 Februari). *Ini pertimbangan hakim yang memberatkan dalam vonis 20 tahun Putri Candrawathi.* HukumOnline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pertimbangan-hakim-yang-memberatkan-dalam-vonis-20-tahun-putri-candrawathi-lt63eabfeb8024f/>